

DAFTAR TUJUAN RISIKO

OPD : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Tujuan Perangkat Daerah			Sasaran Perangkat Daerah			Program/ Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran	Tujuan Program/ Kegiatan
	Uraian	Indikator	Target 2024	Uraian	Indikator	Target 2022		
1	Meningkatnya kualitas kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya angka Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	84	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuann	80	Meningkatnya pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase data DTKS yang tervalidasi
			100	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis) di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya	100	Meningkatnya kebutuhan dasar bagi anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase pemenuhan layanan bagi anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti
							100	
2	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	100	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	100	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan	Persentase peran aktif lembaga kemasyarakatan

Tanggal : 2022
 Disusun oleh : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Tanggal :
 Dievaluasi : (Inspektorat)

Tanggal : 2022
 Disetujui Oleh : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE, M.AP
 NIP. 196803181994031007



DAFTAR RISIKO

No	Tujuan	Jenis Kelompok Risiko	Kode Risiko	Uraian Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal)	Akibat/ Potensi Kerugian	Pemilik Risiko	OPD/ Unit Terkait
1	Meningkatnya kualitas kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Operasional	2022.1a	Kemungkinan pendamping sosial dalam memverifikasi data bantuan sosial belum valid dikarenakan belum ada petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atau perwali terkait kemiskinan	Laporan Yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya	Internal	Informasi terkait kesejahteraan kurang akurat	Kepala Dinas	Pemberdayaan Sosial dan TMP
		Operasional	2022.1b	Kemungkinan data pengaduan Masyarakat yang sudah dan belum menerima bantuan sosial tidak bisa akses ke Pusdatin Kementerian Sosial RI dikarenakan gangguan server	Sarana dan SDM	Eksternal	Informasi terkait kesejahteraan kurang akurat	Kepala Dinas	Pemberdayaan Sosial dan TMP
		Operasional	2022.1c	Kemungkinan ijin operasional dan ijin terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau LKS anak ada yang sudah tidak aktif dikarenakan datang ke DinsosPM hanya untuk kebutuhan	Terdapat prasyarat dan/ atau berkas persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh LKS yang akan difasilitasi	Eksternal	Informasi terkait lembaga kurang akurat	Kepala Dinas	Pemberdayaan Sosial dan TMP
		Operasional	2022.1d	Kemungkinan pembayaran gaji tidak sesuai output yang dihasilkan oleh petugas sosial	Laporan Yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya	Eksternal	Informasi terkait kesejahteraan kurang akurat	Kepala Dinas	Pemberdayaan Sosial dan TMP
		SDM	2022. 2a	Kemungkinan petugas sosial tertular penyakit menular pada saat pendampingan, penjangkauan, dan respon kasus	Sarana dan SDM	Eksternal	Informasi terkait PMKS kurang akurat	Kepala Dinas	Rehsos
		SDM	2022. 2b	Kemungkinan petugas sosial terjadi kecelakaan kerja pada saat pendampingan, penjangkauan, dan respon kasus	Sarana dan SDM	Eksternal	Informasi terkait PMKS kurang akurat	Kepala Dinas	Rehsos
		SDM	2022. 2c	Kemungkinan petugas shelter/TRC terkena penyakit menular pada saat penanganan di shelter	Sarana dan SDM	Eksternal	Informasi terkait PMKS kurang akurat	Kepala Dinas	Rehsos

		SDM / Operasional	2022.. 2d	Kemungkinan petugas shelter/TRC/seksi rehabilitasi sosial diberikan informasi yang tidak sesuai atau salah dari klien sehingga terjadi kesalahan dalam penanganan	Informasi dari hasil assesment dilapangan tidak terpenuhi sesuai dengan instrumen	Eksternal	Informasi yang diperoleh tidak maksimal sesuai dengan instrumen	Kepala Dinas	Rehsos
2	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	SDM	2022. 3a	Kemungkinan petugas Pemberdayaan Masyarakat dapat terjadi kecelakaan kerja pada saat pemberdayaan pada RT, RW, Posyandu, LPM, Karang Taaruna, PKK, Posyantek, dan TTG	Sarana dan SDM	Eksternal	Informasi terkait kelembagaan kurang akurat	Kepala Dinas	Pemberdayaan masyarakat
		Operasional	2022. 3b	Kemungkinan prosedur kerja pemberdayaan tidak sesuai dengan yang dihasilkan pemahaman aturan yang mengatur pemberdayaan tidak sama satu dengan yang lainnya	Terdapat prosedur, proses, dan juknis/juklak yang tidak sama	Eksternal	Perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara petugas pemberdayaan dengan kelembagaan	Kepala Dinas	Pemberdayaan masyarakat
		Operasional	2022.3c	Kemungkinan pelaksanaan pencairan hibah tidak sesuai jadwal dengan kebijakan yang ada tahun berjalan	Terdapat prosedur, proses, dan juknis/juklak yang tidak sama	Eksternal	Perbedaan prosedur yang menyebabkan pertentangan antara petugas pemberdayaan dengan kelembagaan	Kepala Dinas	Pemberdayaan masyarakat
		SDM	2022. 3d	Kemungkinan tertular penyakit dalam pemberdayaan masyarakat	Sarana dan SDM	Eksternal	Informasi terkait kelembagaan kurang akurat	Kepala Dinas	Pemberdayaan masyarakat

Tanggal 2022
 Disusun oleh : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Tanggal :
 Dievaluasi : (Inspektorat)

Tanggal : 2 Januari 2023
 Disetujui Oleh : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Madenur
 NIP. 197102191992031003

 Arbain, SE, M.AP
 NIP. 196803181994031007

SKALA KEMUNGKINAN RISIKO

PD : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Kode Risiko	Uraian Risiko	Skala kemungkinan menurut peserta FGD												Skor Skala Rata - Rata (Pembulatan)	Kriteria Skala		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dst.	Total				
1	2022.1a	Kemungkinan pendamping sosial dalam memverifikasi data bantuan sosial belum valid dikarenakan belum ada petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atau perwali terkait kemiskinan	4	4	4	4	4	4	4							28	4	Sering Terjadi
2	2022.1b	Kemungkinan data pengaduan Masyarakat yang sudah dan belum menerima bantuan sosial tidak bisa akses ke Pusdatin Kementerian Sosial RI dikarenakan gangguan server	3	3	3	3	3	3	3							21	3	Mungkin Terjadi
3	2022.1c	Kemungkinan ijin operasional dan ijin terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau LKS anak ada yang sudah tidak aktif dikarenakan datang ke DinsosPM hanya untuk kebutuhan	2	2	2	2	1	2	1							12	2	Jarang Terjadi
4	2022.1d	Kemungkinan pembayaran gaji tidak sesuai output yang dihasilkan oleh petugas sosial	2	2	2	1	1	1	2							11	2	Jarang Terjadi
5	2022. 2a	Kemungkinan petugas sosial tertular penyakit menular pada saat pendampingan, penjangkauan, dan respon kasus	3	3	3	3	3	3	3							21	3	Mungkin Terjadi
6	2022. 2b	Kemungkinan petugas sosisl terjadi kecelakaan kerja pada saat pendampingan, penjangkauan, dan respon kasus	3	1	1	1	2	2	2							12	2	Jarang Terjadi
7	2022. 2c	Kemungkinan petugas shelter/TRC terkena penyakit menular pada saat penanganan di shelter	1	1	1	2	2	2	2							11	2	Jarang Terjadi
8	2022.. 2d	Kemungkinan petugas shelter/TRC/seksi rehabilitasi sosial diberikan informasi yang tidak sesuai atau salah dari klien sehingga terjadi kesalahan dalam penanganan	2	1	2	1	1	2	2							11	2	Jarang Terjadi

9	2022. 3a	Kemungkinan petugas Pemberdayaan Masyarakat dapat terjadi kecelakaan kerja pada saat pemberdayaan pada RT, RW, Posyandu, LPM, Karang Taaruna, PKK, Posyantek, dan TTG	2	1	2	2	3	2	2					14	2	Jarang Terjadi
10	2022. 3b	Kemungkinan prosedur kerja pemberdayaan tidak sesuai dengan yang dihasilkan pemahaman aturan yang mengatur pemberdayaan tidak sama satu dengan yang lainnya	3	3	3	3	3	3	3					21	3	Mungkin Terjadi
11	2022.3c	Kemungkinan pelaksanaan pencairan hibah tidak sesuai jadwal dengan kebijakan yang ada tahun berjalan	1	1	1	1	2	1	2					9	1	Tidak Terjadi
12	2022. 3d	Kemungkinan tertular penyakit dalam pemberdayaan masyarakat	1	1	1	1	1	1	2					8	1	Tidak Terjadi

Tanggal :
 Disusun oleh : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Tanggal :
 Dievaluasi : (Inspektorat)

Madenur
 NIP. 197102191992031003

Tanggal :
 Disetujui Oleh : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE, M.AP
 NIP. 196803181994031007



SKALA DAMPAK RISIKO

PD : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Kode Risiko	Uraian Risiko	Skala Dampak menurut peserta FGD												Skor Skala Rata - Rata (Pembulatan)	Kriteria Skala	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dst.	Total			
1	2022.1a	Kemungkinan pendamping sosial dalam memverifikasi data bantuan sosial belum valid dikarenakan belum ada petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atau perwali terkait kemiskinan	4	4	4	4	4	4	4						28	4	Besar
2	2022.1b	Kemungkinan data pengaduan Masyarakat yang sudah dan belum menerima bantuan sosial tidak bisa akses ke Pusdatin Kementerian Sosial RI dikarenakan gangguan server	3	3	3	3	3	3	3						21	3	Sedang
3	2022.1c	Kemungkinan ijin operasional dan ijin terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau LKS anak ada yang sudah tidak aktif dikarenakan datang ke DinsosPM hanya untuk kebutuhan	2	2	2	2	3	2	3						16	2	Kecil
4	2022.1d	Kemungkinan pembayaran gaji tidak sesuai output yang dihasilkan oleh petugas sosial	3	2	2	2	2	2	2						15	2	Kecil
5	2022. 2a	Kemungkinan petugas sosial tertular penyakit menular pada saat pendampingan, penjangkauan, dan respon kasus	3	3	3	3	3	3	3						21	3	Sedang
6	2022. 2b	Kemungkinan petugas sosisl terjadi kecelakaan kerja pada saat pendampingan, penjangkauan, dan respon kasus	3	2	2	3	2	2	3						17	2	kecil
7	2022. 2c	Kemungkinan petugas shelter/TRC terkena penyakit menular pada saat penanganan di shelter	2	2	1	2	3	2	2						14	2	Kecil
8	2022.. 2d	Kemungkinan petugas shelter/TRC/seksi rehabilitasi sosial diberikan informasi yang tidak sesuai atau salah dari klien sehingga terjadi kesalahan dalam	2	2	2	3	2	2	2						15	2	Kecil

9	2022. 3a	Kemungkinan petugas Pemberdayaan Masyarakat dapat terjadi kecelakaan kerja pada saat pemberdayaan pada RT, RW, Posyandu, LPM, Karang Taaruna, PKK, Posyantek, dan TTG	2	1	2	2	3	2	2					14	2	Kecil
10	2022. 3b	Kemungkinan prosedur kerja pemberdayaan tidak sesuai dengan yang dihasilkan pemahaman aturan yang mengatur pemberdayaan tidak sama satu	3	3	3	3	3	3	3					21	3	Sedang
11	2022.3c	Kemungkinan pelaksanaan pencairan hibah tidak sesuai jadwal dengan kebijakan yang ada tahun berjalan	3	1	2	1	2	2	2					13	2	Kecil
12	2022. 3d	Kemungkinan tertular penyakit dalam pemberdayaan masyarakat	1	1	2	2	3	2	2					13	2	Kecil

Tanggal :
 Disusun oleh : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Tanggal :
 Dievaluasi : (Inspektorat)

Madenur
 NIP. 197102191992031003

Tanggal :
 Disetujui Oleh : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



DAFTAR RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

PD : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Daftar Risiko							Nilai Residual Risk			Mitigasi Risiko		Penurunan Risiko Yang Diharapkan Pasca Mitigasi		
	Nilai Inhern Risk				Pengendalian*			Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Respon Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko
	Uraian Risiko	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Telah dijalankan 100% / Belum 100%								
1	Kemungkinan pendamping sosial dalam memverifikasi data bantuan sosial belum valid dikarenakan belum ada petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atau perwali terkait kemiskinan	4	4	16	ada	Memadai	Belum 100%	4	4	16	Berbagi	DinsosPM bekerjasama dengan Dinas terkait termasuk Pemerintah Kota			
2	Kemungkinan data pengaduan Masyarakat yang sudah dan belum menerima bantuan sosial tidak bisa akses ke Pusdatin Kementerian Sosial RI dikarenakan gangguan server	3	3	9	ada	Memadai	Belum 100%	3	3	9	Kurangi Kemungkinan (Dikelola secara rutin)	Membangun kerjasama dan komunikasi dengan PUSDATIN Kementerian Sosial RI			
3	Kemungkinan petugas sosial tertular penyakit menular pada saat pendampingan, penjangkauan, dan respon kasus	3	3	9	Ada	Memadai	Belum 100%	3	3	9	Kurangi Kemungkinan (Dikelola secara rutin)	Melaksanakan kegiatan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan			

4	Kemungkinan prosedur kerja pemberdayaan tidak sesuai dengan yang dihasilkan pemahaman aturan yang mengatur pemberdayaan tidak sama satu dengan yang lainnya	3	3	9	Ada	Memadai	Belum 100%	3	3	9	Berbagi	DinsosPM bekerjasama dengan Dinas terkait termasuk Pemerintah Kota				
---	---	---	---	---	-----	---------	------------	---	---	---	---------	--	--	--	--	--

Tanggal
Disusun oleh

Kasubban Perencanaan dan Keuangan

Tanggal :
Dievaluasi : (Inspektorat)

Tanggal
Disetujui Oleh

Madeny
NIP. 197162191992031003

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE, M.AP
NIP. 196803181994031007

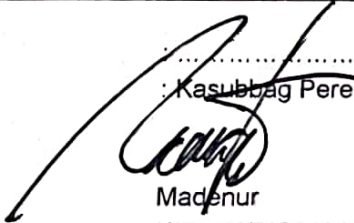
- 1. Kebijakan
- 2. Sosialisasi Kebijakan
- 3. Pelaksanaan Kebijakan
- 4. Evaluasi Kebijakan
- 5. Perbaikan terus menerus

≥3 memadai
<3 belum memadai

PETA RISIKO

		Skala Dampak				
		1-Sangat Kecil	2-Kecil	3-Medium	4-Besar	5-Sangat Besar
Skala Kemungkinan	5-Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4-Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3-Jarang Terjadi	3	6	9	12	15
	2-Kemungkinan Kecil Terjadi	2	4	6	8	10
	1-Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

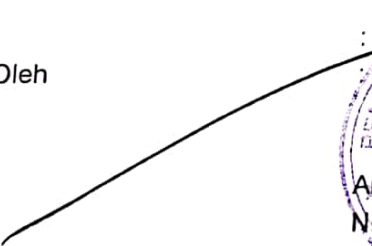
Tanggal 2022
 Disusun oleh : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan



Madenur
 NIP. 197102191992031003

Tanggal :
 Dievaluasi : (Inspektorat)

Tanggal 2022
 Disetujui Oleh : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat




Arbain, SE, M.AP
 NIP. 196803181994031007

RENCANA EVALUASI RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

No	Uraian Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	Waktu Pelaksanaan Dan Realisasi Mitigasi												Bukti Realisasi	Pemilik Risiko	Status Mitigasi	
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
1	Kemungkinan pendamping sosial dalam memverifikasi data bantuan sosial belum valid dikarenakan belum ada petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atau perwali terkait kemiskinan	Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan Pemerintah Kota														Surat	Kepala Dinas	
2	Kemungkinan data pengaduan Masyarakat yang sudah dan belum menerima bantuan sosial tidak bisa akses ke Pusdatin Kementerian Sosial RI dikarenakan gangguan server	Melakukan koordinasi dengan PUSDATIN Kementerian Sosial RI														Surat	Kepala Dinas	
3	Kemungkinan ijin operasional dan ijin terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau LKS anak ada yang sudah tidak aktif dikarenakan datang ke DinsosPM hanya untuk kebutuhan	Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)														Surat	Kepala Dinas	
4	Kemungkinan pembayaran gaji tidak sesuai output yang dihasilkan oleh petugas sosial	Melakukan koordinasi dengan PUSDATIN Kementerian Sosial RI														Surat	Kepala Dinas	
5	Kemungkinan petugas sosial tertular penyakit menular pada saat pendampingan, penjangkauan, dan respon kasus	Melakukan safety pada saat pendampingan asesment klien														SOP	Kepala Dinas	

6	Kemungkinan petugas sosial terjadi kecelakaan kerja pada saat pendampingan, penjangkauan, dan respon kasus	Melakukan safety pada saat pendampingan asesment klien													SOP	Kepala Dinas	
7	Kemungkinan petugas shelter/TRC terkena penyakit menular pada saat penanganan di shelter	Melakukan safety pada saat pendampingan asesment klien													SOP	Kepala Dinas	
8	Kemungkinan petugas shelter/TRC/seksi rehabilitasi sosial diberikan informasi yang tidak sesuai atau salah dari klien sehingga terjadi kesalahan dalam penanganan	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan klien secara instan ketika mendapatkan laporan													SOP	Kepala Dinas	
9	Kemungkinan petugas Pemberdayaan Masyarakat dapat terjadi kecelakaan kerja pada saat pemberdayaan pada RT, RW, Posyandu, LPM, Karang Taaruna, PKK, Posyantek, dan TTG	Melakukan safety pada saat pemberdayaan lembaga													SOP	Kepala Dinas	
10	Kemungkinan prosedur kerja pemberdayaan tidak sesuai dengan yang dihasilkan pemahaman aturan yang mengatur pemberdayaan tidak sama satu dengan yang lainnya	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait													Surat	Kepala Dinas	